

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah yang biasa dikenal kemiskinan. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya pendapatan masyarakat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier serta kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya pendapatan ini akan berdampak pula pada ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar pengeluaran per kapita, standar kesehatan, dan standar pendidikan. (Rahman et al., 2022).

Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun pengertian kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Adapun untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Chamber, kemiskinan adalah gagasan yang kompleks dengan lima dimensi: ketidakberdayaan (*powerlessness*), kemiskinan (*poverty*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), keterasingan (*isolation*) dari segi geografis dan sosiologis. Tidak

hanya kurangnya pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan yang diukur melalui garis kemiskinan, kemiskinan juga memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan minimum, Kesehatan, air bersih, Pendidikan, dan sanitasi. Namun, kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan definisi atau dimensi saja, melainkan berhubungan dengan metode pengukuran garis kemiskinan. (Suryawati, 2005).

Menurut Supriatna mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang memiliki banyak keterbatasan dan terjadi bukan atas keinginan individu yang bersangkutan. tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja, pendapatan, Kesehatan gizi, serta kesejahteraan hidup yang menunjukkan lingkaran setan, menjadikan seseorang miskin. Terbatasnya sumber daya manusia di sekolah formal dan non formal dapat menyebabkan kemiskinan yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya Pendidikan formal.

Definisi kemiskinan menurut Jarnasy dalam (Suryawati, 2005) dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sumber daya yang terbatas dan bisa disebabkan pula karena rendahnya tingkat perkembangan teknologi. Kemiskinan alamiah ini bisa dikatakan ketertinggalan seseorang atau komunitas dalam mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dalam memenuhi kebutuhan. Karena seperti yang kita ketahui semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula teknologi untuk menunjang kebutuhan dalam mengakses kemudahan suatu pekerjaan. Sedangkan kemiskinan buatan yang disebabkan oleh sarana kelembagaan atau Pembangunan yang dibuat oleh suatu Lembaga yang

menyebabkan masyarakat tidak mampu menguasai sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan buatan ini bisa disebut dengan kemiskinan struktural. (Suryawati, 2005).

Menurut Jeffrey Sachs dalam (Purwanto, 2012) orang yang sangat miskin setidaknya tidak memiliki indikator utama, diantaranya:

1. *Human Capital* (modal manusia), yang dibutuhkan seseorang menjadi produktif diantaranya kesehatan, nutrisi, dan keahlian.
2. *Business Capital* (modal bisnis), yang dibutuhkan dalam pertanian, industri, dan jasa diantaranya teknologi, dan beberapa fasilitas alat transportasi bermotor.
3. *Infrastructure*, pembangunan jalan, pembangunan kesehatan, air, sanitasi, bandara, pelabuhan dan sistem telekomunikasi.
4. *Natural Capital* (modal alami), untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan masyarakat butuhkan yaitu lahan yang cocok untuk bercocok tanam, tanah yang subur, keanekaragaman hayati, dan ekosistem.
5. *Public Institutional Capital*, untuk menopang pembagian kerja yang tentram dan aman dibutuhkan hukum komersial, sistem yudisial, berbagai pelayanan, dan kebijakan pemerintah.
6. *Knowledge Capital*, untuk meningkatkan produktivitas dalam dunia bisnis maka diperlukan pengetahuan *scientific* dan teknologi.

Beberapa jenis kemiskinan diantaranya :

- a) Kemiskinan absolut, yaitu jenis kemiskinan dengan tingkat pendapatan di

bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

- b) Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan Pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga mengakibatkan terhadinya ketimpangan pada pendapatan atau bisa dikatakan seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Penyebab kemiskinan menurut Nasikun dalam jurnal (Suryawati, 2005), ada beberapa runtutan penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya: a) *Socio economi dualism*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pola produksi kolonial biasanya dialami oleh negara-negara eks koloni. b) *Population Growth*, yaitu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk tanpa diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. c) *Natural Cycle and Processes*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh cuaca. Bisa dicontohkan saat musim hujan tiba di beberapa daerah akan mengalami banjir, namun saat kemarau tiba di beberapa daerah akan mengalami kemarau yang menyebabkan kekeringan. d) *Cultural and Ethnic Factors*, yaitu disebabkan oleh budaya dan etnik yang mempertahankan pola kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena jika terjadi pada petani contohnya saat musim panen raya, para petani akan mengonsumsi hasil panen yang

berlebihan, dampaknya saat musim panen telah selesai para petani akan kekurangan bahan makanan hasil dari panen. (Suryawati, 2005)

Adapun penyebab kemiskinan yaitu disebabkan karena kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural menekankan pada nilai dan norma, ini artinya bahwa nilai, norma, dan perilaku diserahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan akibat ketidaksetaraan sistematis, hal tersebut termasuk pada ketidaksetaraan pendapatan, akses yang kurang layak bahkan tidak layak, diskriminasi rasial atau gender, dan kebijakan pemerintah yang dirasa tidak efektif.

Setidaknya, ada beberapa faktor penyebab kondisi kemiskinan, antara lain 1) taraf pendidikan dan kesehatan yang rendah menyebabkan terhambatnya pengembangan kualitas suatu individu dan mobilitas. Hal tersebut akan berdampak pula pada penerimaan dunia kerja. Dunia kerja tentunya akan menyerap tenaga kerja yang berkualitas. 2) Kesehatan dan gizi yang kurang, hal tersebut berdampak pada rendahnya kekuatan fisik dan lemahnya berpikir. 3) langkanya lapangan pekerjaan akan memperparah kondisi kemiskinan, setidaknya dengan lapangan pekerjaan yang banyak akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap, hal tersebut akan memperbaiki kondisi perekonomian seseorang. 4) sulitnya jangkauan pada akses pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 5) kondisi politik yang tidak stabil yang nantinya akan berdampak pada sulitnya mengimplementasi program-program yang telah direncanakan. (Kadji, n.d.)

a. Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kemiskinan klasik yang diantaranya:

1) Teori Kemiskinan Struktural

Menurut teori kemiskinan struktural, salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidaksetaraan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Distorsi politik ini diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang tidak dapat memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya yang tersedia yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki keadaan seseorang yang disebabkan oleh pemerintah yang diskriminatif dalam hal sistem politik. (Purwanto, 2012). Selain itu, peraturan pemerintah biasanya membatasi kesempatan untuk bekerja. Dalam hal pengurusan surat-surat kewarganegaraan dan berbagai dokumen administrasi pemerintah merupakan bagian dari keadaan terdistorsi atau terdiskriminasi secara politis. Selain itu, biasanya tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang terdistorsi secara politik. (Purwanto, 2012).

Ada pula distorsi sosial yang menjadi salah satu indikator penyebab kemiskinan. Pandangan sosial berdasarkan ras, gender, maupun agama akan menyebabkan distorsi sosial yang berdampak pada diabaikannya kesempatan individu atau kelompok yang memiliki kemampuan. Distorsi sosial juga diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk terlibat dalam hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas. (Purwanto, 2012)

Selain itu distorsi ekonomi yang dipandang sebagai penyebab kemiskinan struktural didefinisikan sebagai keterbatasan kondisi dimana seorang individu atau kelompok untuk terlibat secara luas dalam mengakses lapangan kerja dan berusaha

di berbagai bidang tertentu saja. Distorsi ekonomi ini biasanya orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk memilih pekerjaan dengan bebas seperti halnya masyarakat lain, mereka hanya memiliki akses pada pekerjaan tertentu, sementara masyarakat lainnya memiliki akses yang luas dan tidak terbatas pada pekerjaan lain. Mereka yang terdistorsi secara ekonomi juga biasanya hanya dapat menjalankan bisnis tertentu dan memiliki keterbatasan dalam mengakses modal. (Purwanto, 2012)

2) Teori Kemiskinan Kultural

Teori kemiskinan kultural ini dikenalkan oleh Oscar Lewis yang menyatakan bahwa orang miskin menunjukkan berbagai pola tindakan dan sikap yang merupakan cara terbaik untuk bertahan hidup yang penuh dengan kekurangan. Beberapa masyarakat kelas bawah di Indonesia yang mengalami kemiskinan kultural yaitu nelayan dan petani. Kebudayaan yang mengalami kemiskinan kultural ini yaitu adanya dorongan sikap seperti menerima Nasib, meminta-minta, atau mengharapkan bantuan sosial atau sedekah. (Palikhah et al., 2016) Ciri terpenting dari kemiskinan kultural menurut Oscar Lewis (Purwanto, 2012) yaitu kurangnya efektivitas partisipasi dalam lembaga utama masyarakat, langkanya sumber daya ekonomi, diskriminasi, ketakutan, apatis. masyarakat dengan kemiskinan kultural ini tidak banyak menghasilkan kekayaan dan uang, cenderung pendapatannya kecil, serta memiliki tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah.

Menurut penjelasan teori kemiskinan kultural di atas, kemiskinan kultural yang berkelanjutan inilah yang menyebabkan berbagai kekurangan pada individu

yang merasakan kemiskinan kultural, hal tersebut membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan dan bahkan menciptakan stereotip yang menganggap orang lain pemalas, tidak berjuang, dan tidak dapat ditolong.

Konsep kemiskinan kultural mengatakan bahwa orang miskin menjadi miskin karena anggapan dirinya miskin. Dampaknya banyak anak-anak yang mendapatkan makanan yang tidak layak, mendapatkan Pendidikan yang buruk, dan menganggap kemiskinan sebagai suatu kepastian oleh teman dan keluarga mereka (Palikhah et al., 2016). Dengan adanya anggapan seperti itu maka akan timbulnya perbuatan-perbuatan yang melanggar dan mirisnya hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dan diwajarkan. Dampak dari menormalisasi perilaku tersebut menyebabkan munculnya kriminalitas dan kekerasan yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan bersama. Dapat disimpulkan bahwa keadaan yang menyimpang tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan yang serba miskin yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, orang-orang miskin telah menyebarkan nilai-nilai dan tindakan yang dapat mengabadikan kemiskinan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk berpikir secara konseptual serta kecenderungan yang sangat kuat untuk mengatasi kekecewaan dan kegagalan menyebabkan Tindakan kekerasan dan kriminal (Palikhah et al., 2016).

2.1.2. Angka Harapan Hidup

Penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik akan menjadi kontribusi besar pada penurunan tingkat kemiskinan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesejahteraan dilihat dari beberapa Sejarah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat didukung

dengan kemajuan di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, dan peningkatan gizi yang terjadi pada saat Inggris selama revolusi industri, di Jepang dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20an. Selain itu pada Pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan 60-an. Maka dari itu, negara dengan penduduk yang sehat, akan memiliki perekonomian yang lebih sehat. Karena Kesehatan merupakan indikator pendukung yang dapat mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. (Valiant Kevin et al., 2022)

Salah satu indikator untuk mengukur kesehatan individu di suatu daerah yaitu dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. AHH adalah umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Metode tak langsung (*indirect estimation*) digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Untuk menghitung Angka Harapan Hidup (AHH), dua jenis data digunakan yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Standar UNDP menetapkan batas atas usia 85 tahun dan batas terendah 25 tahun untuk menghitung indeks harapan hidup. (Ayu et al., 2018)

2.1.3. Angka Melek Huruf

Pendidikan berfungsi sebagai pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, jika pendidikan gagal, bangsa tersebut akan segera hancur. Ini karena pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, bagi setiap bangsa yang ingin maju, pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama. Salah satu cara untuk melihat perkembangan pendidikan penduduk adalah dengan melihat jumlah orang

yang melek huruf. Tingkat melek huruf yang lebih tinggi dikaitkan dengan derajat sumber daya manusia yang lebih tinggi. Karena kemampuan mereka untuk menyerap informasi atau pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan, orang yang dapat membaca dan menulis dianggap memiliki kemampuan dan keahlian. Pengentasan kemiskinan juga berdampak pada kesehatan masyarakat, dengan peningkatan tingkat kesehatan akan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dibandingkan dengan anak yang sehat, penurunan tingkat kesehatan anak akan berdampak pada kesediaan anak untuk belajar di sekolah, tingkat absensi atau bolos di sekolah, dan kurangnya kedisiplinan waktu saat menerima pelajaran. Ini berdampak pada kemungkinan anak menamatkan sekolah tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan dengan baik. (Nur et al., 2020)

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial yaitu dengan menghitung tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf atau tidak buta huruf. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta memahami kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. AMH dapat dihitung dengan data dari pertanyaan SUSENAS "Dapat membaca dan menulis" di seksi Keterangan Pendidikan (BPS, 2012). AMH ini diukur dengan proporsi penduduk usia >15 yang bisa membaca dan menulis dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{AMH umur 15 tahun ke atas} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mampu membaca dan menulis

B : jumlah penduduk lebih dari 15 tahun

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan membaca tulis, semakin tinggi kualitas dan kualitas sumber daya manusia. Orang yang bisa membaca dan menulis dianggap memiliki kemampuan dan keterampilan karena mereka dapat memproses informasi secara lisan maupun tulisan. (Dores & Jolianis, 2015)

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Subandi dalam (Yudistira Dama et al., 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan GDP/GNP. Definisi ini tidak mempertimbangkan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, negara maju dapat memberikan lebih banyak kepada warganya, seperti pendidikan universal untuk anak-anak, sumber daya yang lebih besar untuk perawatan kesehatan, serta pensiun publik. Adapun menurut Sukirno dalam (Yudistira Dama et al., 2016), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang menghasilkan perubahan pendapatan sektor riil. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu dan dibandingkan dengan pendapatan nasional riil tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini meningkat seiring dengan kemajuan teknologi

serta perubahan organisasi dan budaya.

Tokoh ekonomi klasik dalam Sukirno (Yudistira Dama et al., 2016) menyebutkan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam sistem produksi suatu negara, antara lain:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan tempat paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dan jumlah sumber daya yang tersedia memberikan batas maksimum untuk pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Jumlah penduduk memainkan peran pasif dalam proses pertumbuhan output. Hal tersebut berarti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
3. Luas tanah yang nantinya dapat digunakan dalam proses produksi.
4. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut.

Pendapatan nasional adalah indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional ini dihasilkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap wilayah, yaitu nilai tambah bruto dari seluruh barang atau jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Adapun menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah bisnis atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada wilayah tersebut (BPS, 2012). Kemajuan suatu wilayah dicirikan dari tingginya nilai PDRB, begitu pun

sebaliknya. PDRB atas harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu, sedangkan PDRB atas harga berlaku dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. (Yudistira Dama et al., 2016)

Perhitungan PDRB menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Ada tiga cara berbeda untuk menghitung metode langsung ini yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Namun, masing-masing dari metode ini menghasilkan hasil yang sama. Ketiga pendekatan perhitungan PDRB ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan atau sektor ekonomi dengan mengurangi biaya antara dari produksi bruto total sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah dapat dihitung dengan mengurangi nilai penjualan produk dengan nilai bahan baku material pendukung. Nilai tambah ini contohnya seperti pengiklanan produk, menawarkan promosi jualan, dan penawaran-penawaran lainnya.

Adapun yang disebut dengan biaya antara yaitu nilai barang dan jasa yang dipergunakan untuk input antara dalam proses produksi. Biaya antara pada barang dan jasa ini yaitu bahan baku yang biasanya habis dalam sekali proses produksi dan biasanya juga mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biaya antara tidak termasuk biaya balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan Perusahaan. Begitu pun dengan penyusutan dan

pajak tidak langsung neto yang bukan merupakan biaya antara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sektor yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah menggunakan pendekatan produksi yaitu Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa Perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam proses produksi di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB dilakukan dengan mengumpulkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto. (BPS, 2012)

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

PDRB adalah jumlah total pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan perusahaan swasta yang tidak mencari untung (yayasan, institut), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto di suatu negara. Perhitungan PDRB dilakukan dengan melihat bagaimana barang dan jasa yang dibuat di negara tersebut digunakan. (BPS, 2012)

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung untuk menghitung PDRB provinsi adalah dengan mengalokasikan jumlah Produk Domestik Bruto Indonesia untuk setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu; alokator ini dapat termasuk nilai produk bruto atau neto setiap sektor, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, populasi, dan alokator lainnya yang relevan. Nilai tambah suatu sektor atau sub sektor dapat dihitung dengan persentase atau bagian masing-masing provinsi dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut.

PDRB adalah indikator pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa output nasional meningkat selama periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Banyak teori pertumbuhan ekonomi telah muncul selama perkembangannya, termasuk teori pertumbuhan Kuznet, teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, dan teori pertumbuhan endogen.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Penganut aliran klasik Adam Smith dan David Ricardo, membangun teori pertumbuhan ekonomi klasik selama revolusi industri akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

a. Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) adalah orang pertama yang secara sistematis membahas pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Ia membahas proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Smith, ada dua komponen utama

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Tiga komponen utama sistem produksi suatu negara adalah SDA yang tersedia, SDM, dan stok barang ada. (Ichvani & Sasana, 2019)

Adam Smith berpendapat bahwa untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, spesialisasi atau pembagian kerja harus ada agar perkembangan ekonomi dapat berlanjut. Keterampilan tenaga kerja yang lebih baik, penemuan mesin atau alat baru, dan peningkatan kualitas produk semuanya akan mempercepat dan meningkatkan produksi. Dijelaskan bahwa sebelum pembagian kerja, harus ada akumulasi kapital, yang berasal dari dana tabungan. Selain itu, Smith menekankan "luas pasar", yang berarti bahwa pasar harus seluas mungkin untuk menampung hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional menarik perhatian karena hubungan perdagangan internasional menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari kedua pasar dalam negeri dan luar negeri. (Ichvani & Sasana, 2019)

b. David Ricardo

Ricardo menjadi pemikir mazhab yang paling menonjol selain Adam Smith, yang dianggap sebagai pakar utama dan pelopor teori ekonomi mazhab klasik. Teorinya pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1817, *The Principles of Political Economy and Taxation*.

Empat kelompok permasalahan yang dikembangkan terkait perangkat teori oleh Ricardo, antara lain:

- 1) Terkait nilai dan harga barang.

- 2) Terkait distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
- 3) Terkait perdagangan internasional.
- 4) Terkait akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Proses pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu:

- 1) Jumlah tanah terbatas.
- 2) Meningkat atau menurunnya tenaga kerja (penduduk) tergantung pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat upah minimal.
- 3) Akumulasi modal terjadi ketika tingkat keuntungan pemilik modal lebih besar dari tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk melakukan investasi.
- 4) Kemajuan teknologi.
- 5) Sektor pertanian dominan.

Jika luas tanah terbatas, pertumbuhan penduduk, atau tenaga kerja, akan menurunkan produk marginal atau disebut juga *the law diminishing of return*. Selagi buruh pada tanah menerima tingkat upah di atas upah minimum, maka tenaga kerja akan terus bertambah justru hal ini akan produk marginal tenaga kerja dan akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses tersebut akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah minimum. Jadi, dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi memiliki

kecenderungan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return*, dan akan memperlambat penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Sejak tahun 1950-an, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik telah berkembang. Teori ini didasarkan pada analisis pertumbuhan ekonomi dari perspektif klasik. Pada tahun 1987, Robert Solow dianugerahi hadiah nobel bidang ekonomi karena model pertumbuhan neoklasik yang dia buat sangat membentuk teori pertumbuhan neoklasik. Menurut pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemajuan teknologi serta peningkatan penyediaan faktor produksi seperti akumulasi modal, tenaga kerja, dan penduduk. Menurut penelitian Solow, peran kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting. (Ichvani & Sasana, 2019)

Menurut teori pertumbuhan neoklasik, keterbelakangan negara-negara berkembang disebabkan oleh alokasi sumber daya yang buruk secara keseluruhan, yang selama ini bergantung pada kebijakan pengaturan harga yang salah dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Jika keduanya dilihat secara terpisah, model pertumbuhan neoklasik Solow bergantung pada gagasan bahwa skala hasil yang terus berkurang dari input modal dan tenaga kerja. Namun, jika keduanya dilihat secara bersamaan, Solow menggunakan asumsi skala hasil tetap. Pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan model fungsi agregat standar, seperti

$$Y = F(A, K, L)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal fisik (kapital), L adalah tenaga kerja, dan A adalah teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik ini adalah investasi. Pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi, yang juga dikenal sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas. Model pertumbuhan ini berpendapat bahwa pertumbuhan output selalu disebabkan oleh satu atau lebih dari tiga faktor: peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui perbaikan pendidikan dan pertumbuhan jumlah penduduk), penambahan modal (melalui investasi dan tabungan), dan kemajuan teknologi. Selain itu, dikatakan bahwa perekonomian tertutup, atau ekonomi yang hancur, memiliki tingkat tabungan rendah dan tidak menjalin hubungan dengan pihak luar. Dalam jangka pendek, perekonomian ini cenderung mengalami laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi. Namun, perekonomian terbuka (*open economic*), yang bergantung pada perdagangan dengan negara lain, pasti akan melihat peningkatan pendapatan per kapita karena arus permodalan mengalir dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dengan rasio modal-tenaga kerja yang rendah, yang menawarkan tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi. (Ichvani & Sasana, 2019)

c. Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznet menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi negara maju selama periode waktu yang cukup lama. Perkembangan teknologi, pembangunan institusi dan kelembagaan, sikap, dan ideologi

menentukan pertumbuhan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet yaitu suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Hampir semua negara maju memiliki enam karakteristik ini yaitu (Ichvani & Sasana, 2019):

- 1) pertumbuhan output per kapita yang tinggi;
- 2) peningkatan tingkat produktivitas faktor produksi;
- 3) transformasi struktur ekonomi yang cepat;
- 4) transformasi sosial dan ideologi yang tinggi;
- 5) kecenderungan negara maju untuk memperluas pasar dan sumber bahan baku mereka ke negara lain, yang dikenal sebagai penetrasi ekonomi; dan
- 6) pertumbuhan ekonomi yang terbatas tersebar luas, dengan hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang lain.

d. Teori Pertumbuhan Seimbang Ragnar Nurske

Teori pertumbuhan seimbang telah dijelaskan oleh Prof Nurske. Ia berpendapat bahwa lingkaran setan kemiskinan ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan di negara-negara terbelakang merupakan hambatan utama bagi pembangunan di negara-negara terbelakang. Pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan, yang secara alami akan menghasilkan investasi yang lebih sedikit, dan pada gilirannya akan menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Produksi yang rendah akan menghasilkan pendapatan rendah pula. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan rendahnya permintaan terhadap

barang. Dengan kata lain, hal ini akan menghasilkan ruang lingkup pasar yang lebih terbatas. Karena itu, tidak akan ada insentif investasi. (Bass, 2009)

Menurut Nurkse insentif untuk berinvestasi mungkin rendah karena rendahnya daya beli masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil mereka, dan juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Namun rendahnya tingkat produktivitas adalah akibat dari kecilnya jumlah modal yang digunakan dalam produksi, yang pada akhirnya mungkin disebabkan oleh dorongan untuk berinvestasi. Ragnar Nurkse berpandangan bahwa Pembangunan ekonomi terkena dampak negatif dari lingkaran setan kemiskinan. Pembangunan ekonomi hanya bisa terwujud jika lingkaran setan kemiskinan diputus. (Bass, 2009)

2.1.5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan cara pemerintah untuk mengatur perekonomian. Pengeluaran pemerintah berkontribusi pada pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melakukan pengeluaran belanja Pembangunan untuk melaksanakan fungsi alokatif, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif. (Azwar, 2016). Menurut Sukirno dalam (Azmi & Panjawa, 2022) pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan pemerataan distribusi pendapatan. Mereka juga bertujuan untuk meningkatkan modal fisik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sehingga perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat tercipta. Kapasitas penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, seperti layanan kesehatan atau pendidikan, adalah masalah utama

kemiskinan. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah diharuskan melakukan fungsi pemerintahan melalui pengeluaran atau belanja untuk penduduk miskin. Beberapa teori pengeluaran pemerintah menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Warger

Peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan karena lima alasan yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiring pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan tidak efisiensinya birokrasi pemerintahan. (Azmi & Panjawa, 2022)

2. Rostow dan Musgrave

Teori Rostow tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menekankan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mempersiapkan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Efek dari pengeluaran pemerintah melalui sarana prasarana dapat mengurangi total kemiskinan yang terjadi. Sedangkan menurut Musgrave Selama proses pembangunan ekonomi, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional meningkat, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional menurun.

Teori pengeluaran pemerintah ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif tinggi karena kebutuhan akan prasarana. Kemudian, pada tahap menengah,

pemerintah terus berusaha mendorong investasi dari pihak swasta dan pemerintah untuk memacu pertumbuhan sehingga dapat lepas landas. Pada tahap ini, peran pemerintah sangat penting karena banyaknya kegagalan pasar yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi (Azmi & Panjawa, 2022).

Bentuk pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat merupakan pengeluaran pemerintah melalui sektor sosial khususnya pada kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pendidikan sangat penting untuk menjalani kehidupan yang layak, sedangkan kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan. Pemerintah berinvestasi dalam sektor kesehatan dan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Karena pendidikan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan maupun kesehatan (Azmi & Panjawa, 2022).

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fery Andrianus dan Khaira Alfatih, “Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan dengan Menggunakan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia” (2023)	Variabel Kemiskinan (Y), metode kuantitatif, alat analisis data panel.	Skala penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, Sanitasi (X1), Listrik(X2), Jalan (X3).	Hasil analisis dapat disimpulkan infrastruktur sanitasi, infrastruktur jalan, dan infrastruktur listrik berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis – Vol. 5, No 1. ISSN : 2714-8491
2	Edi Dores dan Jolianis, Padang. “Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat” (2015)	X1 : Angka Melek Huruf X2 : Angka Harapan Hidup Y : Jumlah penduduk miskin	Objek penelitian di Sumatera Barat, periode tahun penelitian 2005 – 2011. Metode penelitian menggunakan metode <i>time series</i> .	Angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan, sedangkan angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan, dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.	<i>Journal of Economic Education</i> Vol.2 (126 – 133) ISSN : 2302 – 1590 E-ISSN: 2460 – 190X
3	Edi Victara Tinambunan Muhammad Findi, Yeti Lis Purnamadewi, (2019), “Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017”	Variabel kemiskinan, variabel infrastruktur	Objek penelitian di Indonesia, periode tahun 2013 – 2017, alat analisis menggunakan tipologi Klassen.	Pembangunan infrastruktur memengaruhi kemiskinan yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain itu, Infrastruktur yang memengaruhi pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa adalah distribusi air bersih, panjang jalan, jumlah rumah sakit dan puskesmas serta rata-rata lama sekolah. Di luar Pulau Jawa infrastruktur yang memengaruhi	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Juli 2019, 8(1): 20 – 42 ISSN : 1979-5149 EISSB : 2686-2514

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pertumbuhan PDRB adalah distribusi volume air bersih, panjang jalan, rasio elektrifikasi dan rata-rata lama sekolah.	
4	Ahmad, dkk. (2018) “ <i>The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Indonesia</i> ”	X1 : GDP Growth Y : Percentage of Poor Supporters	X2: <i>Gini Coefficients</i> , X3: <i>Human Development Index</i> . Objek penelitian di 33 Provinsi di Indonesia. Periode tahun 2009 - 2015	PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Rasio Gini dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	<i>IOSR Journal of Economics and Finance 9</i> (IOSR-JEF). e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321—5925. Vol. 9, Issue 4 Ver. II, PP 20-26. www.iosrjournals.org
5	Azwar dan Achmat Subekin (2016), “Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan”	X1 : PDRB Y : Kemiskinan Metode Teknik analisis regresi data panel.	X2 : Pengangguran X3 : Indeks Kesehatan X4 : Angka Partisipasi sekolah X5 : Belanja Daerah. Objek Analisis di Sulawesi Selatan	Seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, hanya variabel belanja daerah yang memiliki pengaruh signifikan.	Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 2, Nomor 1 Juni 2016: 1 – 25
6	Harman, Abdul Rahman, Sudirman. (2022). “Efek Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan dan	X2 : Angka Harapan Hidup Y1 : Kemiskinan	X1 : Rata-rata lama sekolah Y2 : Pertumbuhan ekonomi Alat analisis menggunakan <i>path analysis</i> .	Variabel rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone, sedangkan variabel angka harapan hidup berpengaruh positif	KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 9 Issue 2 (2022) Hal. 268 – 276. ISSN: 1907-3011.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi”		Objek penelitian di Kabupaten Bone.	signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone. Variabel RLS dan AHH tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	
7	Arfa Valiant K., Ardito Bhinadi, Akhmad Syari’udin. (2022). “Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021”	Y : Kemiskinan X1 : PDRB X3 : Angka Harapan Hidup Alat analisis menggunakan regresi data panel	X3 : Rata-rata lama sekolah Objek penelitian di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Periode tahun penelitian tahun 2013-2021.	Variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan tahun 2013-2021. Sedangkan variabel lainnya yaitu AHH dan RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2021.	SIBATIK <i>JOURNAL</i> (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan). Volume 1 No. 12. E-ISSN 2809-8544.
8	Himawan Yudistira Dama, Agnes L CH Lapian, Jacline I. Sumual. (2016). “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2005-2014)”	X1 : PDRB Y : Kemiskinan	Objek analisis di Kota Manado. Alat analisis menggunakan regresi berganda. tahun penelitian 2005-2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 03 Tahun 2016.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Ratih Dewi Lestari. (2021). “Analisis Pengaruh AMH, Jumlah Penduduk, Pengangguran, AHH, dan PDB terhadap Kemiskinan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand Pada Tahun 2000-2020”	X1 : Angka Melek Huruf X4 : Angka Harapan Hidup X5 : PDB Y : Kemiskinan Alat analisis menggunakan regresi data panel.	X2 : Jumlah Penduduk X3 : Pengangguran. Objek penelitian di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tahun penelitian 2000 – 2020.	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara angka melek huruf (AMH) dan produk domestik bruto (PDB) terhadap kemiskinan, serta variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan Angka Harapan Hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
10	Setyo Novianto dan Heri Sudarsono (2018) “ <i>Analysis of Poverty Level in Districts/Cities of Central Java</i> ”	X1 : Pertumbuhan ekonomi Alat analisis menggunakan regresi data panel.	X2: IPM, X3: Inflasi, X4: Pengangguran. Objek penelitian di Jawa Barat. Tahun Penelitian 2011-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	<i>Journal of Economic Development.</i> Vol.16, No. 01 Juni 2018
11	Lutfiana Fiqry Ichvani, Hadi Sasana. (2019). “Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5”	Variabel pengeluaran pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel persepsi korupsi, keterbukaan perdagangan. Objek penelitian di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Periode tahun 2012-2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN. Sedangkan variabel penjelas lain seperti konsumsi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol. 4. No. 1. 2019. P-ISSN: 2541-433X. E-ISSN: 2508-0205.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Reza Mu'tiqul Azmi, Jihad Lukis Panjawa. (2022). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan."	X1 : GDP Y : Kemiskinan	X2 : Pengeluaran Pemerintah pada sektor Pendidikan X3 : pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan X4 : pengangguran Objek penelitian di Indonesia. Metode penelitian menggunakan <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL). Periode tahun penelitian 1996-2021	Dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan tidak signifikan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh positif tidak signifikan	TRANSEKONO MIKA: Akuntansi, Bisnis. Dan Keuangan. Volume 2 Issue 6 (2022). E-ISSN: 2809-6851.
13	Julia Nur Indah Sari, Ida Nuraini. (2020). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa"	X1 : Angka Melek Huruf X2 : Angka Harapan Hidup Y : Kemiskinan	X3 : Pengangguran. Objek penelitian di Pulau Jawa. Periode tahun penelitian 2014 – 2019. Alat analisis menggunakan regresi data panel.	Berdasarkan hasil dari angka melek huruf maka dapat dilihat variabel tersebut memiliki hasil negatif dan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). Vol. 2. Mei 2020, 309 – 323.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Nyoman Ayu Tria Pramesti dan I K. G Bendesa. (2018). “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.”	X1 : Angka Harapan Hidup X3 : Pendapatan Per kapita Y: Kemiskinan	X2 : Pendidikan Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Objek penelitian di Provinsi Bali. Periode penelitian tahun 2000 – 2016.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Per kapita dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sementara Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.	E-Jurnal EP UNUD, 7(9): 1887-1917. ISSN: 2303-0178
15	Ropikatul Hasanah, Syaparuddin, dan Rosmeli. (2021). “Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi”	X1 : Angka Harapan Hidup X3 : Pengeluaran per kapita Y : Tingkat kemiskinan Alat analisis menggunakan regresi data panel.	X2 : Rata-rata lama sekolah Objek penelitian di Kab/Kot. Provinsi Jambi. Periode tahun 2015 – 2019.	Hasil analisis variabel angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan angka harapan hidup, lama-lama rata sekolah dan pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.	E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. No.3, September – Desember 2021 ISSN: 2303-1255.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Alamanda (2020) “ <i>The Effect of Government Expenditure on Inequality and Poverty Panel Data Analysis from 33 Provinces in Indonesia</i> ”			Belanja infrastruktur berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di pedesaan daripada perkotaan.	<i>Journal of International Institute of Social Studies</i> . DOI : 10.3109/jia.v.4i.6 14

2.2. Kerangka Pemikiran

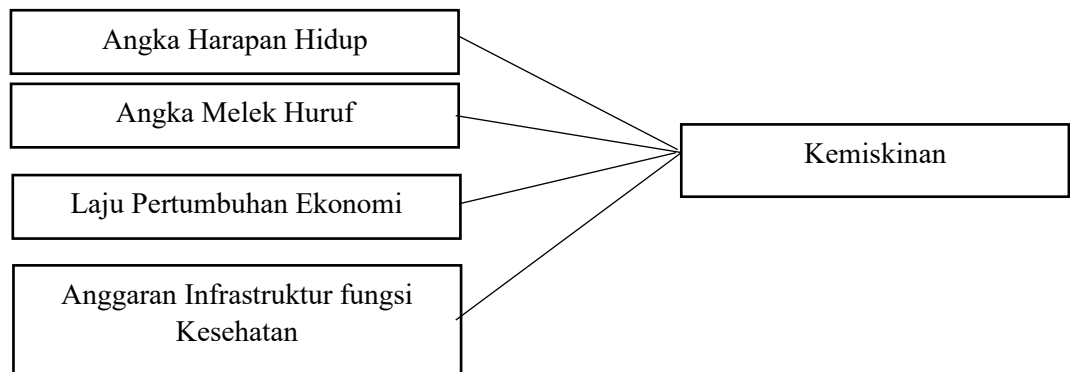
Kemiskinan adalah keadaan seseorang memiliki standar hidup yang rendah dan pendapatan per kapita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, hal tersebut masih menghadapi masalah kemiskinan, apalagi wilayah timur yang kurang terfokuskan pada pembangunan ekonomi.

Produk Domestik Bruto (PDB) memberikan gambaran yang luas tentang kondisi perekonomian suatu wilayah. Pembangunan ekonomi sebuah negara akan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Menurut Edi Dores (2015), menyatakan melek huruf dan harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Begitu pun dengan penelitian Azwar dan Achmat Subekan (2016) membuktikan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa secara umum pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan yang terus menerus seiring dengan penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian tinjauan Pustaka yaitu teori dan hasil analisis

penelitian terdahulu maka dalam penelitian yang mengambil kasus di 5 provinsi wilayah timur, kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Penulis melakukan penelitian dilatar belakangi dengan data kondisi kemiskinan di 5 provinsi wilayah Indonesia timur masih tergolong tinggi disertai dengan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang rendah namun kemiskinan yang cukup tinggi menjadi permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di 5 provinsi Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 – 2022. Setelah melakukan tinjauan pustaka dari beberapa literatur yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya serta data-data yang diperoleh, lalu menentukan judul dan variabel – variabel dalam penelitian. Selanjutnya, penulis menentukan model dan metode analisis yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan metode analisis data serta tinjauan Pustaka, diharapkan mampu menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

2.2.1. Hubungan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan yaitu pada kesehatan yang buruk. Beberapa indikator Kesehatan di negara berpendapatan rendah dan menengah dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi menunjukkan korelasi yang signifikan antara tingkat kesakitan dan kematian. Meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin disebabkan pada beberapa alasan yaitu pertama, masyarakat miskin lebih rentan terhadap penyakit karena tidak memiliki akses air bersih, serta kecukupan gizi yang memadai. Kedua, masyarakat miskin cenderung menahan diri untuk mendapatkan pengobatan meskipun sangat membutuhkan, karena mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi penyakit yang mereka alami.

Menurut penelitian (Dores & Jolianis, 2015) dengan judul Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara angka harapan hidup dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat, angka harapan hidup berdampak negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Ini berarti bahwa semakin tinggi nilai angka harapan hidup, semakin rendah jumlah penduduk miskin, dan sebaliknya, angka harapan hidup yang lebih rendah akan berdampak terhadap jumlah penduduk miskin yang lebih rendah.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ropikatul Hasanah, dkk. (2021) bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika angka harapan hidup meningkat dan pihak pemerintah dapat menekan angka kemiskinan melalui Kesehatan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Selain itu menurut penelitian Valian Kevin, dkk. (Valiant Kevin et al., 2022) bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa setiap kenaikan 1 tahun angka harapan hidup akan mempengaruhi penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2. Hubungan Angka Melek Huruf terhadap Kemiskinan

Pendidikan adalah tujuan Pembangunan utama karena pendidikan membentuk kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pendidikan masih dianggap remeh bagi sebagian kalangan masyarakat. Indonesia masih terlalu terbebani dengan masalah hidup, terutama ekonomi. Adanya anggapan bahwa sekolah harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, maka dari itu sebagian masyarakat memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Bagaimana bisa mereka menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat tinggi sementara mereka masih kesulitan untuk mendapatkan makan. Keyakinan masyarakat terhadap kesuksesan dan kekayaan tampaknya tidak berkorelasi dengan pendidikan, terutama bagi masyarakat pedesaan mereka percaya bahwa bekerja keras dan berdaganglah yang diperlukan untuk menjadi

kaya.

Salah satu indikator pendidikan yaitu melek huruf. Jumlah masyarakat melek huruf akan meningkat karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas hal tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, sumber daya manusia dengan pendidikan yang kurang akan sejalan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagaimana dalam penelitian Edi Dores bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. (Dores & Jolianis, 2015)

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yakni penelitian Lulut Lavenia, dkk. (2023) bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya sektor pendidikan yaitu indikator angka melek huruf maka akan menurunkan tingkat kemiskinan,

Hasil penelitian lain dari Ananda Rizal dan Yantieka Nadya (2022) memperkuat penelitian sebelumnya bahwa pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan. Penelitian ini diasumsikan bahwa dengan menurunnya tingkat kemiskinan salah satunya disebabkan oleh meningkatnya komponen pendidikan yaitu indikator angka melek huruf.

2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja, pembagian penambahan-penambahan pendapatan akan menjadi tidak seimbang (*ceteris paribus*) yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan

kemiskinan yang meningkat. (Yudistira Dama et al., 2016)

Menurut Kuncoro dalam (Yudistira Dama et al., 2016) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dikenal sebagai pendekatan pembangunan yang lebih berfokus pada meningkatkan PDRB provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, pengukuran Pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan melainkan harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan merata ke seluruh masyarakat dan menikmati hasilnya. Menurunkan PDRB suatu wilayah tergantung pada kualitas dan konsumsi rumah tangga. Apabila pendapatan masyarakat terbatas, maka akan berdampak pada masyarakat yang memilih untuk membeli barang-barang atau pola makanan yang lebih murah dengan jumlah barang yang lebih sedikit. (Yudistira Dama et al., 2016)

Selanjutnya menurut penelitian Safuridar (Safuridar, 2017) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat penting, seperti peran pemerintah dalam distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Pengentasan kemiskinan adalah tujuan Pembangunan yang harus dipenuhi. Anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan berfungsi sebagai media untuk mempercepat atau mengurasi tingkat kemiskinan serta masalah Pembangunan lainnya. Besaran pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam pengalokasian

APBD untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah menentukan kesejahteraan. APBD dan pelaksanaan kebijakan pemerintah berfokus pada kesejahteraan publik untuk pengurangan kemiskinan. (Azwar & Subekin, 2016)

Penelitian oleh Hasibuan dalam (Azwar & Subekin, 2016) menegaskan terkait peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara anggaran pendapatan dan jumlah orang miskin. Dengan kata lain, semakin besar anggaran pendapatan, semakin rendah tingkat kemiskinan.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dkk., (2017) bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan melalui penurunan pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Artinya sudah ada dampak dalam hal menurunkan angka kemiskinan karena fasilitas kesehatan sudah bisa dirasakan masyarakat secara maksimal oleh keluarga miskin.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh (Azmi & Panjawa, 2022) bahwa pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek.

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini dengan mengacu pada kerangka berpikir, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga angka harapan hidup, angka melek huruf, laju pertumbuhan ekonomi,

dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di lima provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012 – 2022.

2. Diduga angka harapan hidup, angka melek huruf, laju pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di lima provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012 – 2022.